

**HAMBATAN *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE*
REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA) DALAM MENANGANI PENDUDUK PALESTINA
DI GAZA PADA 2023 - 2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RAHMA AMELIA FITRY

21323019

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**HAMBATAN *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE*
REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA) DALAM MENANGANI PENDUDUK PALESTINA
DI GAZA PADA 2023 - 2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RAHMA AMELIA FITRY

21323019

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
Hambatan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*
(UNRWA) dalam Menangani Penduduk Palestina di Gaza pada 2023 - 2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 September 2025



Rahma Amelia Fitry

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian.....</i>	<i>15</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>16</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 UNRWA DAN GENOSIDA DI GAZA.....	18
2.1. Genosida dan krisis kemanusiaan di Gaza	18
2.2. Operasional UNRWA di Gaza	28
<i>2.2.1. Pembentukan dan Mandat UNRWA</i>	<i>28</i>
<i>2.2.2. Struktur Organisasi UNRWA.....</i>	<i>29</i>
<i>2.2.3. Wilayah Operasi Kerja.....</i>	<i>31</i>
<i>2.2.4. Program Kerja dan Kegiatan UNRWA</i>	<i>31</i>
BAB 3 HAMBATAN UNRWA DI GAZA	37
3.1. Hambatan Politik UNRWA di Gaza.....	37

3.2. Hambatan Organisasi UNRWA di Gaza	41
3.3. Hambatan Teknikal UNRWA di Gaza.....	44
3.4. Hambatan Komunitas UNRWA di Gaza	48
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Korban di Gaza Oktober 2023 - Juli 2025	26
---	-----------

ABSTRAK

UNRWA adalah organisasi internasional dibawah PBB yang menangani penduduk Palestina di Gaza pada tahun 2023-2025. Konflik antara Israel dan Palestina yang berlangsung sejak 2023 telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran infrastruktur penting. Penelitian ini menganalisis hambatan UNRWA dengan menggunakan konsep *The Limits of Humanitarian Action* oleh Hugo Slim yang mencakup batasan politik, organisasi, teknis, komunitas, dan moral. Hasil penelitian menemukan bahwa hambatan utama yang dihadapi UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza pada 2023-2025 adalah keterbatasan operasional UNRWA akibat konflik yang berlangsung serta banyaknya tekanan politik dari negara-negara Barat. Penyebab dari hambatan tersebut meliputi pembatasan akses masuk ke wilayah Gaza oleh Israel, penghentian dana dari beberapa negara donor, serta serangan langsung terhadap fasilitas dan staff UNRWA. Selain itu, UNRWA juga mengalami masalah seperti netralitas dan independensi dalam memberikan bantuan. Penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan aksi kemanusiaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari faktor internal yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri.

Kata-kata kunci: UNRWA, Gaza, Palestina, Israel, *The Limits of Humanitarian Action*

ABSTRACT

UNRWA is an international organization under the United Nations that deals with the Palestinian population in Gaza in 2023-2025. The conflict between Israel and Palestine that has been ongoing since 2023 has caused many casualties and the destruction of important infrastructure. This study analyzes the obstacles faced by UNRWA using Hugo Slim concept of *The Limits of Humanitarian Action*, which includes political, organizational, technical, community, and moral limitations. The results of the study found that the main obstacles faced by UNRWA in dealing with the Palestinian population in Gaza in 2023-2025 are UNRWA's operational limitations due to the ongoing conflict and significant political pressure from Western countries. The causes of these obstacles include restrictions on access to the Gaza Strip by Israel, the suspension of funds from several donor countries, and direct attacks on UNRWA facilities and staff. In addition, UNRWA also faces problems such as neutrality and independence in providing assistance. This study emphasizes that the limitations of humanitarian action do not only stem from external factors, but also from internal factors faced by the organization itself.

Keywords: UNRWA, Gaza, Palestina, Israel, *The Limits of Humanitarian Action*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang bersenjata yang berlangsung di suatu negara, sering menyebabkan banyak korban, khususnya warga sipil. Perang terjadi di antara kedua negara yaitu Palestina-Israel yang berada di kawasan Timur Tengah ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya warga sipil yang tinggal di wilayah yang terdampak konflik tersebut. Perang ini terjadi pasca Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang menyebabkan banyak sekali imigran Yahudi memasuki wilayah tanah Palestina. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris pada tanggal 2 November 1917, yang menyatakan dukungan untuk tanah air bagi kaum Yahudi yang ada di Palestina. Dokumen ini ditandatangani oleh Arthur Balfour, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, dan disampaikan kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris (Nurjannah and Fakhruddin 2019).

Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat internasional dan organisasi internasional, termasuk PBB. Melihat konflik yang terjadi antara kedua negara ini, PBB selaku organisasi internasional pun turun tangan melihat apa yang terjadi di Palestina-Israel. Konflik yang terus menerus terjadi antara kedua negara ini membuat PBB memutuskan untuk mendirikan organisasi yang berguna untuk membantu para pengungsi Palestina dan penduduk Palestina di Gaza. Persetujuan pembentukan UNRWA berasal dari Majelis Umum PBB mengeluarkan

Resolusi 302 (IV) pada tanggal 8 Desember 1949, PBB membentuk organisasi yang bernama *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* (Bocco 2009).

UNRWA mulai beroperasi pada tahun 1950. Organisasi ini dibentuk untuk melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah Palestina, memberikan bantuan langsung, serta menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. UNRWA diberikan mandat untuk berfokus pada pengungsi Palestina (Bartholomeusz 2009). Tujuan utama pendirian UNRWA adalah memberikan bantuan kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Palestina. Sejak awal berdirinya, UNRWA telah berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi pengungsi Palestina. Organisasi ini juga bertanggung jawab menangani masalah pengungsi Palestina di wilayah Yordania, Suriah, Lebanon, Gaza, dan Tepi Barat. Selain itu, UNRWA memperoleh dukungan pendanaan dari negara-negara donor utama seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Prancis.

Pada 7 Oktober 2023 perang antara Palestina-Israel kembali memanas ketika Hamas melancarkan aksi yang disebut *Operasi Badai Al-Aqsa* dengan menembakkan sekitar 5.000 rudal dari Gaza ke wilayah selatan Israel. Selain itu, Hamas yang merupakan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina juga menyerang Israel di jalur perbatasan Gaza-Israel. Mereka menghancurkan tembok perbatasan Gaza-Israel, memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan, dan menyerang permukiman dekat instalasi militer Israel. Serangan tersebut direspons oleh Israel dengan menyatakan perang dan mengirim pasukan mereka ke Jalur Gaza (Al Jazeera 2023).

Penyerangan yang terjadi pada periode tersebut juga memunculkan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam operasi Hamas. Dugaan ini membuat sejumlah negara donor besar menghentikan bantuan dana kepada UNRWA. Penghentian dana tersebut berdampak serius terhadap keberlanjutan program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi pengungsi Palestina, yang sangat bergantung pada keberadaan UNRWA (Al Jazeera 2024a).

Pada November 2024, Israel juga menyampaikan kepada PBB bahwa mereka telah menghentikan kerja sama dengan UNRWA yang telah berlangsung sejak tahun 1967. Keputusan ini disusul dengan disahkannya undang-undang oleh parlemen Israel pada Oktober 2024 yang secara resmi melarang UNRWA beroperasi di Israel (VOA Indonesia 2024b). Kebijakan tersebut semakin menghambat ruang gerak UNRWA dalam menyalurkan bantuan bagi jutaan warga Palestina.

Pasca konflik Oktober 2023, UNRWA menghadapi berbagai hambatan yang serius. Pertama, kerusakan fasilitas dan hilangnya sumber daya manusia dikarenakan banyak sekolah dan pusat kesehatan UNRWA rusak akibat serangan, sementara ratusan staf UNRWA tewas dan terluka. Kedua, akses kemanusiaan yang terbatas, karena adanya blokade yang dilakukan oleh Israel serta kehancuran infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan. Ketiga, krisis pendanaan akibat penghentian bantuan dari negara donor yang dapat mengancam keberlanjutan program bantuan UNRWA. Keempat, lonjakan jumlah pengungsi, karena sebagian besar penduduk Gaza terpaksa berpindah-pindah tempat perlindungan, sehingga beban UNRWA semakin berat dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan betapa sulitnya UNRWA untuk menjalankan mandat kemanusiannya dalam kondisi darurat.

Penelitian ini membahas hambatan yang dialami UNRWA sebagai organisasi internasional dalam menangani penduduk Palestina di Gaza yang terdampak perang Palestina–Israel. Fokus penelitian diarahkan pada hambatan yang dihadapi UNRWA sebagai organisasi yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan bagi penduduk Palestina di Gaza. Pembahasan meliputi krisis kemanusiaan dan genosida di Gaza, serta hambatan yang dialami UNRWA dalam menyalurkan bantuan. Seperti diketahui, UNRWA memiliki mandat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan bagi penduduk Palestina di Gaza.

Berdasarkan uraian tersebut, penting bagi peneliti untuk mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi UNRWA dalam memberikan bantuan dan melindungi korban konflik Palestina–Israel. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk melihat bagaimana UNRWA, sebagai organisasi internasional, beroperasi di tengah situasi konflik yang penuh tantangan.

Periode penelitian difokuskan pada Oktober 2023 hingga Juli 2025. Rentang waktu ini dipilih karena pada periode tersebut terjadi perang bersenjata yang berdampak signifikan terhadap penduduk Palestina di Gaza dan operasional UNRWA. Periode tersebut menjadi acuan peneliti untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dialami UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini diberi judul: “Hambatan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Menangani Penduduk Palestina pada 2023–2025.”

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja hambatan yang dialami *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menangani penduduk Palestina di Gaza pada Oktober 2023 - Juli 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran dan mandat *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) secara umum, khususnya di wilayah Gaza.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menangani penduduk Palestina di Gaza pada Oktober 2023 - Juli 2025.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada hambatan yang dihadapi UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza pada periode Oktober 2023 hingga Juli 2025. Rentang waktu ini dipilih karena perang Palestina-Israel yang kembali memanas sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 hingga Juli 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat signifikan, termasuk meningkatnya

jumlah korban jiwa, hancurnya infrastruktur, dan terhambatnya distribusi bantuan kemanusiaan.

Salah satu organisasi internasional yang aktif memberikan bantuan serta secara rutin melaporkan aktivitas mereka dalam peristiwa tersebut adalah United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Penelitian ini mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi UNRWA, karena lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu penduduk Palestina di Gaza pada periode konflik tersebut. UNRWA juga aktif menyalurkan bantuan langsung, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan mandat kemanusiaannya.

Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah Gaza karena Gaza merupakan pusat konflik dengan tingkat kerusakan paling parah terjadi di wilayah ini, serta hampir seluruh penduduknya sangat bergantung pada layanan UNRWA. Selain itu, Gaza memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara wilayah operasi UNRWA lainnya, sehingga tantangan kemanusiaan yang muncul lebih sulit.

Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh situasi perang Palestina–Israel secara menyeluruh, melainkan hanya menyoroti tantangan yang secara langsung memengaruhi operasional UNRWA dalam memberikan bantuan kepada penduduk Gaza pada periode Oktober 2023 hingga Juli 2025.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung proses penelitian yang dilakukan, peneliti menjadikan beberapa sumber dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan

diteliti. Peneliti juga akan menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan kutipan dalam melakukan penelitian.

Tulisan pertama ditulis oleh Ayat Hamdan (2024) dalam jurnal yang berjudul *“The Israeli War Against UNRWA and Its Impact on Palestinian Refugees”*. Dalam tulisannya, ia membahas UNRWA yang berdiri sejak tahun 1949 dan memiliki mandat sementara untuk memberikan layanan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina, namun menghadapi kritik, defisit pendanaan dan tekanan politik dari negara donor maupun Israel. Hamdan juga menjelaskan serangan Israel pasca 7 Oktober 2023 yang dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu menghancurkan fasilitas dan membunuh staf UNRWA, melakukan *securitization* dengan menuding UNRWA terkait Hamas, serta mempolitisasi bantuan kemanusiaan sebagai hukuman kolektif. Ia menegaskan bahwa tujuan Israel untuk melemahkan bahkan membubarkan UNRWA agar isu pengungsi Palestina dan *right of return* dihapus dari politik internasional (Hamdan 2024).

Tulisan kedua ditulis oleh Elena Fiddian-Qasmiyeh (2019) dalam jurnal yang berjudul *“The Changing Faces of UNRWA”*. Dalam tulisannya ia menulis respon UNRWA terkait pengurangan bantuan dana oleh pemerintah AS pada 2018. Elena juga bagaimana UNRWA merespons di tingkat global melalui kampanye *#DignityIsPriceless*, dan juga menyoroti dampak berupa pengurangan layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak pekerja. Ia juga menyimpulkan bahwa krisis keuangan akan memperburuk kondisi pengungsi Palestina dan membuat UNRWA semakin rapuh (Fiddian-Qasmiyeh 2019).

Dari beberapa literatur yang disertakan sebelumnya, terlihat bahwa tulisan Ayat Hamdan lebih menyoroti strategi politik Israel dalam melemahkan UNRWA pasca 7

Oktober 2023, sementara tulisan Elena Fiddian-Qasmiyeh berfokus pada krisis finansial UNRWA akibat pemotongan dana dari AS pada 2018. Kedua jurnal ini sudah menguraikan peran serta tantangan yang dihadapi UNRWA. Namun, penelitian sebelumnya tidak secara khusus membahas bagaimana hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap upaya UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza setelah perang 7 Oktober 2023 hingga Juli 2025. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan gambaran terkait hambatan UNRWA dalam menangani para penduduk Palestina pada Oktober 2023 – Juli 2025.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep teori *The Limits of Humanitarian Action* yang ditulis oleh Hugo Slim (2014) guna memahami permasalahan serta menjadi acuan peneliti dalam menulis skripsi. Dalam konsep teori ini dijelaskan bahwa secara ideal, bantuan kemanusiaan seharusnya diberikan sesuai dengan kebutuhan orang yang menderita akibat perang dan bencana, berdasarkan prinsip utama kemanusiaan dan ketidakberpihakan. Namun dalam kenyataannya, bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai batasan. Meskipun jumlah dan cakupannya kini lebih besar dari sebelumnya. Namun ada beberapa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan manusia yaitu masih banyak orang yang membutuhkan tetapi belum tertolong (batasan kuantitatif) dan beberapa orang yang terjangkau tetapi tidak terbantu dengan baik, sehingga bantuan yang ada hanya terpenuhi sebagian dan tidak tepat (batasan kualitatif). Selain itu, adanya tantangan moral antara pemberian bantuan

darurat dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Hambatan dari aksi kemanusiaan juga datang dari faktor eksternal seperti kondisi politik konflik dan bencana, dan sikap komunitas, serta faktor internal seperti organisasi kemanusiaan itu sendiri, seperti masalah koordinasi dan keterbatasan teknologi (Slim 2014).

Dalam teori *The Limits of Humanitarian Action* terdapat 5 faktor batasan utama dalam aksi kemanusiaan, yaitu:

1. Batasan Politik

Dalam batasan politik, hambatan politik menjadi penghalang utama dalam aksi kemanusiaan dalam situasi perang dan bencana. Politik antikemanusiaan yang menolak nilai-nilai kemanusiaan, seperti dalam konflik bersenjata yang menjalankan ideologi anti-sipil yang ekstrim dan tidak menghormati prinsip-prinsip perlindungan dan bantuan, dan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti pembunuhan, pengusiran, kelaparan, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, ada pula politik pengabaian kemanusiaan, di mana bantuan diprioritaskan hanya pada wilayah yang mendukung pemerintah, sementara wilayah musuh atau pemberontak dibatasi aksesnya, sehingga bantuan menjadi tidak adil dan politis.

Politisasi juga terjadi di tingkat donor internasional, seperti negara-negara Barat (OECD) yang sering memberikan bantuan dengan tujuan politik, misalnya untuk mendukung perang atau pembangunan negara tertentu. Dana dari kemanusiaan Islam global juga cenderung berfokus pada wilayah Muslim, sehingga distribusi bantuan menjadi tidak merata secara global. Selain itu,

keterkaitan organisasi kemanusiaan dengan operasi militer, membuat para aktivis kemanusiaan sering dianggap berpihak dan menjadi sasaran serangan, sehingga menghambat pelaksanaan bantuan. Selain militer, kelompok konflik juga membatasi bantuan demi keuntungan sendiri, seperti di Somalia di mana bantuan dari AS dibatasi untuk menghindari jatuh ke Al Shabaab, sementara kelompok Al Shabaab menolak bantuan barat. Kondisi ini dikenal sebagai tantangan “akses kemanusiaan” yaitu kesulitan organisasi membantu korban dengan adil dan netral. Meskipun ruang akses semakin sempit dan jangkauan bantuan semakin luas namun tetap mendapatkan tekanan. Oleh karena itu, para aktivis kemanusiaan perlu memahami hukum internasional dan menggunakan keterampilan negosiasi serta keteguhan untuk tetap menjalankan tugas secara efektif dan aman di tengah konflik (Slim 2014).

2. Batasan Organisasi

Selain batasan politik, aksi kemanusiaan juga memiliki hambatan pada sistem kemanusiaan internasional seperti PBB, Palang Merah, dan organisasi non pemerintah yang mengalami hambatan internal. Respons kemanusiaan internasional melibatkan banyak organisasi dengan kepentingan, mandat dan cara kerja yang berbeda. Sehingga, koordinasi yang ada menjadi sulit dan berfokus pada kesepakatan bersama, bukan dari arahan yang tegas. Hal ini, menyebabkan kurangnya kepemimpinan strategis yang nyata di lapangan, sehingga efektivitas respons kemanusiaan menjadi terbatas. Selain itu, faktor psikologis seperti keraguan dan pola pikir dapat menghambat penanganan krisis yang cepat, seperti pada kelaparan di Tanduk Afrika yang terlambat diatasi

akibat sikap terlalu berhati-hati dan tekanan dari pihak politik. Oleh karena itu, organisasi kemanusiaan perlu membangun pengambilan keputusan yang cepat dan berani, didukung dengan pimpinan yang kuat, agar bantuan dapat efektif dan menyelamatkan lebih banyak nyawa (Slim 2014).

3. Batasan Teknikal

Dalam batasan teknis, teknologi dan keahlian dalam bantuan kemanusiaan, terutama di bidang kesehatan darurat selama 40 tahun terakhir telah berkembang pesat dengan prinsip dan praktik yang kini dipahami dengan baik. Namun, kendala terbesar bukan karena kurangnya pengetahuan atau keahlian, namun sulitnya menyebarkan dan menerapkan pengetahuan tersebut di lapangan. Beberapa masalah utama lainnya adalah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang sering diserang dalam konflik, serta keterbatasan sumber daya, peralatan, gaji, infrastruktur, dan akses yang membuat para pekerja kemanusiaan tidak bisa menjalankan bantuan dengan efektif. Selain itu, kualitas organisasi kemanusiaan masih beragam, ada yang profesional dan efektif, tetapi ada juga yang tidak efisien dan buruk pengelolaannya sehingga merugikan para penerima bantuan. Meski teknologi dan keahlian telah maju, namun penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan yang besar dan beberapa masalah yang menghambat efektivitas bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, agar bantuan kemanusiaan yang ada lebih optimal dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan operasional (Slim 2014).

4. Batasan Komunitas

Dalam batasan komunitas, aksi kemanusiaan yang dianggap sebagai bantuan eksternal sering kali harus berinteraksi dan bekerja dengan struktur dan dikontrol pemerintah lokal dan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat secara luas diakui sebagai cara terbaik dan tepat agar bantuan dapat tepat sasaran dan adil, namun pada kenyataannya komunitas dan pemerintahan lokal sering menghadapi konflik kepentingan, persaingan sosial, dan korupsi yang dapat mempengaruhi distribusi bantuan. Resiko penyalahgunaan bantuan oleh elite lokal atau kelompok tertentu dan potensi bantuan dapat memperparah konflik kekerasan juga menjadi masalah yang serius. Selain itu, tenaga kesehatan internasional juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks politik dan sosial lokal agar merancang layanan yang adil, netral dan efektif, yang memerlukan dukungan dari komunitas pekerja dan analisis politik. Hal ini, menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga perlunya pemahaman dan pengelolaan politik, sosial dan kekuasaan yang ada di tingkat lokal agar bantuan yang ada tepat sasaran, adil dan tidak memperburuk konflik yang ada (Slim 2014).

5. Batasan Moral

Dalam batasan moral, lembaga dan pekerja kemanusiaan dalam situasi perang dan bencana sering kali menghadapi batasan moral dan etika. Aksi kemanusiaan dibatasi oleh *International Humanitarian Law* dan Kode Etik Organisasi Kemanusiaan yang menegaskan prinsip bantuan yang bersifat adil dan netral, sehingga membatasi jenis bantuan yang diberikan agar tidak

memengaruhi atau mengubah keseimbangan kekuatan dalam konflik. Aksi kemanusiaan sering menghadapi masalah dalam membedakan antara bantuan yang bersifat darurat dan bantuan yang bertujuan untuk membangun atau memperbaiki secara jangka panjang. Selain itu, sulit untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menghentikan bantuan agar sistem yang sudah dibuat tetap berjalan dengan baik. Ada situasi yang sangat membingungkan, yaitu ketika bantuan kemanusiaan berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan selama konflik yang berlangsung lama, maka jika organisasi bantuan pergi, kondisi kesehatan masyarakat bisa kembali memburuk. Jadi, mundurnya lembaga bantuan bisa membuat kualitas pelayanan kesehatan menurun kembali ke tingkat yang lebih buruk. Oleh karena itu, aksi kemanusiaan harus dikelola dengan hati-hati agar tetap efektif, berkelanjutan dan tidak memperburuk kondisi yang ada di lapangan (Slim 2014).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis hambatan UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di wilayah Gaza. Konsep teori *The Limits of Humanitarian Action* memiliki relevansi terhadap konteks penelitian ini karena dapat menjelaskan berbagai faktor internal maupun eksternal UNRWA sebagai organisasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan di Gaza.

Dalam teori ini, menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan masih menghadapi berbagai batasan utama yang saling berkaitan, yakni batasan politik, organisasi, teknis, komunitas dan moral. Penelitian ini memilih fokus pada empat faktor yang paling relevan dengan konteks operasional UNRWA di Gaza, yaitu batasan politik, organisasi, teknis dan komunitas. Teori ini membantu peneliti dalam

mengelompokkan berbagai hambatan yang dialami UNRWA, sehingga lebih mudah untuk melihat faktor mana yang paling dominan mempengaruhi kinerja UNRWA sebagai organisasi kemanusiaan.

Namun, dari lima faktor yang ada, penelitian ini hanya menggunakan empat faktor, yaitu batasan politik, organisasi, teknis dan komunitas. Faktor moral tidak digunakan karena dalam konteks perang yang terjadi di Palestina Israel pada periode 2023-2025, UNRWA masih beroperasi dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama UNRWA adalah penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan pada dilema moral seperti peralihan antara bantuan darurat dan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini akan memakai empat hambatan yang lebih relevan yaitu batasan politik, organisasi, teknis dan komunitas yang secara langsung memengaruhi operasional UNRWA di Gaza.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep *The Limits of Humanitarian Action*, UNRWA sebagai organisasi kemanusiaan yang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina di Gaza telah mengalami banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi 5 aspek yaitu batasan politik, organisasi, komunitas dan moral yang saling berkaitan serta memperumit efektivitas UNRWA dalam menjalankan tugasnya. Dari kelima faktor, penulis hanya akan menggunakan empat faktor, yaitu batasan politik, organisasi, teknis dan komunitas. Faktor moral tidak terdapat dalam hambatan UNRWA, karena kondisi UNRWA di Gaza masih berada pada kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama UNRWA Adalah penyelamatan nyawa dan

pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan pada dilema moral. Oleh karena itu, hambatan yang paling relevan untuk dianalisis adalah hambatan politik, organisasi, teknis dan komunitas yang secara nyata telah memengaruhi operasional UNRWA dalam menjalankan mandat kemanusiaannya di Gaza.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian terhadap hambatan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* sebagai organisasi internasional dalam menangani para penduduk Palestina di Gaza pada Oktober 2023-Juli 2025 adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena tertentu dalam subjek penelitian seperti perilaku, tindakan dan sebagainya yang diuraikan secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata (Fiantika et al. 2022).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* yang memiliki peran dalam menghadapi penduduk Palestina di Gaza. Objek dalam penelitian ini adalah hambatan dalam menangani penduduk Palestina pada Oktober 2023-Juli 2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan *library research*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat data sekunder yaitu yang dilakukan dengan mengumpulkan buku,

e-journal, media massa dan artikel yang berkaitan dengan penelitian dan data primer yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui website resmi UNRWA. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari buku, *e-journal*, website resmi UNRWA, media massa, dan artikel yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, tahap awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku, *e-journal*, website resmi UNRWA, media massa dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah proses pengumpulan data, peneliti membaca keseluruhan data dan informasi yang telah didapatkan untuk memahami bahan bacaan dalam data yang diperoleh, peneliti juga mencatat informasi penting dalam data yang diperoleh. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti memilah data yang dapat dikelola, dan menentukan pola penulisan dalam penelitian ini. Dengan proses tersebut dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada para pembaca.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yaitu:

Bab I: Dalam bab ini akan memuat mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini peneliti akan menjelaskan genosida dan krisis kemanusiaan di Gaza, dan operasional UNRWA di Gaza.

Bab III: Pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah diatas mengenai hambatan UNRWA dalam menangani penduduk Palestina pada Oktober 2023 - Juli 2025 dengan konsep teori *The Limits of Humanitarian Action*.

Bab IV: Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan analisa mengenai hambatan UNRWA dalam menangani para penduduk Palestina di Gaza.

BAB 2

UNRWA DAN GENOSIDA DI GAZA

2.1. Genosida dan krisis kemanusiaan di Gaza

Perang bersenjata yang terjadi di kedua negara yaitu Palestina dan Israel, kembali memanas pada 7 Oktober 2023. Hal ini dipicu oleh serangan yang dilancarkan oleh Hamas, yang disebut Operasi Badai Al-Aqsa, sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang dirasakan oleh rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Serangan tersebut direspons oleh Israel dengan serangan balasan yang menewaskan banyak warga Palestina di Gaza. Konflik bersenjata ini mengakibatkan tindakan genosida di Gaza, sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah.

Genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang paling berat dan diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan manusia (Taufiqurokhman and Herman 2024). Dalam Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan, secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok berdasarkan nasionalitas, etnis, ras, atau agama (Dalimunthe and Azizah 2024). Tindakan ini sangat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia karena dilakukan secara sengaja dengan tujuan mengurangi atau memusnahkan populasi kelompok tersebut.

Istilah dari adanya genosida pertama kali ditulis oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe*, khususnya dalam kaitannya dengan tragedi Holocaust pada masa Perang Dunia II

(Taufiqurokhman and Herman 2024). Menurut Lemkin, genosida adalah proses penghancuran hidup dan budaya suatu kelompok yang tertindas, di mana kelompok tersebut hanya diizinkan tinggal di wilayah kelompok penindas dan mengalami tekanan serta perpindahan penduduk. Istilah genosida mulai dikenal luas ketika Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap penjahat perang Nazi dalam Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Jerman. Meski kata "genosida" baru muncul pada awal tahun 1940-an, upaya penuntutan atas kejahatan genosida telah dimulai sejak tahun 1918 (Dalimunthe and Azizah 2024).

Genosida yang terjadi di Gaza dilakukan oleh Israel sebagai upaya menghancurkan sebagian maupun seluruh wilayah Palestina. Serangan Israel di Gaza dianggap sebagai genosida karena melanggar ketentuan hukum internasional yang diatur oleh Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma tahun 1998 (Azzahra et al. 2024a). Hal ini dibuktikan dari penggunaan kekuatan militer Israel yang menyerang wilayah Palestina selama konflik bersenjata, menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Israel menolak seruan internasional untuk gencatan senjata dan terus melancarkan serangan yang menewaskan banyak warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti ini menghancurkan sebagian besar daerah di Gaza.

Genosida bertujuan menghancurkan, memusnahkan suatu kelompok atau wilayah, sedangkan krisis kemanusiaan adalah situasi darurat yang menyebabkan penderitaan akibat konflik dan bencana. Konflik bersenjata ini berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ekonomi Palestina, khususnya di Gaza, mengalami kemunduran tajam.

Pada tahun 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza diperkirakan turun sekitar 27%, menjadi penurunan terparah dalam tiga dekade, jauh lebih buruk dibandingkan masa Intifada Kedua, Perang Gaza 2014, maupun resesi akibat COVID-19. Perekonomian Gaza hampir lumpuh total dengan penyusutan PDB sebesar 83% setiap tahun. Pada awal 2025, sempat terjadi gencatan senjata sementara yang memperbaiki kondisi, namun tidak diperpanjang sehingga konflik kembali terjadi dan berpotensi memperburuk pembangunan dan krisis kemanusiaan (World Bank Economic Monitoring Report 2025a).

Pasar tenaga kerja yang sudah lemah makin merosot, dengan tingkat pengangguran mencapai 80%. Banyak warga Palestina sulit memperoleh pekerjaan di wilayahnya dan umumnya mencari kerja di luar Palestina. Konflik ini menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan dan penghasilan, meningkatkan angka kemiskinan dari 29% di 2023 menjadi hampir 40% pada akhir 2024. Sebagian besar warga Palestina di Gaza hidup dalam kemiskinan dan sangat bergantung pada bantuan makanan dan kebutuhan dasar. Selama gencatan senjata, kondisi membaik sedikit karena organisasi kemanusiaan dapat menyalurkan bantuan ke sekitar 1,2 juta orang, tetapi setelah gencatan senjata berakhir, perbatasan ditutup kembali sehingga distribusi bantuan makin terhambat dan kekurangan pangan makin parah (World Bank Economic Monitoring Report 2025b).

Konflik bersenjata yang terjadi di Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di wilayah tersebut. Berdasarkan data satelit PBB (UNOSAT) per Desember 2024, sekitar dua pertiga dari lebih dari 170.000 bangunan yang ada sebelum perang telah rusak dan hancur, yang setara dengan sekitar 69% dari seluruh

bangunan di Jalur Gaza. Total bangunan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 245.123 unit. Akibatnya, lebih dari 1,8 juta orang tidak memiliki tempat tinggal dan membutuhkan penampungan darurat di Gaza (VOA Indonesia 2025a).

Kerusakan infrastruktur ini diperkirakan mengakibatkan kerugian finansial senilai \$18,5 miliar dolar AS hingga akhir Januari 2024. Kerusakan tersebut tidak hanya mencakup rumah tinggal, tetapi juga fasilitas perdagangan, industri, serta layanan penting kemanusiaan seperti pendidikan, kesehatan dan energi. Menurut laporan dari kantor kemanusiaan PBB pada Januari, kurang dari 25% dari cadangan air yang tersedia sebelum perang masih dapat diakses, sedangkan sekitar 68% jaringan jalan mengalami kerusakan. Selain itu, lebih dari setengah lahan pertanian yang ada di Gaza juga rusak akibat konflik, padahal lahan tersebut sangat penting untuk menyediakan makanan bagi penduduk yang menghadapi kelaparan. Analisis gambar satelit yang dilakukan PBB juga menunjukkan kerusakan signifikan pada kebun buah, tanaman pangan, dan sayuran di wilayah Palestina. Selain itu, konflik yang saat ini terjadi telah menghancurkan lebih dari 200 fasilitas pemerintah, 136 sekolah dan universitas, 823 masjid, serta 3 gereja dan banyak rumah sakit yang hancur dan mengalami kerusakan selama terjadinya konflik (VOA Indonesia 2025a).

Konflik bersenjata yang sedang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pendidikan di wilayah tersebut. Sekitar 85% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerusakan hingga hancur akibat dampak yang terjadi karena adanya serangan militer (UNRWA 2024). Akibat rusaknya bangunan sekolah ini, banyak sekolah yang tidak dapat digunakan lagi dan memerlukan

perbaikan atau rehabilitasi yang sangat besar agar dapat digunakan lagi untuk proses belajar mengajar dan sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak.

Tidak hanya sekolah umum, sekolah yang dikelola oleh UNRWA juga terkena dampak akibat perang, hampir 70% sekolah yang dikelola oleh UNRWA telah mengalami serangan, dan tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan hingga hancur. Saat ini, 95% dari bangunan sekolah digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi (UNRWA 2024). Sekolah telah berubah, yang awalnya menjadi tempat pendidikan yang aman bagi anak-anak sekarang menjadi tempat penampungan, dan tempat penderitaan. Dampak dari konflik ini bukan hanya menghancurkan bangunan tetapi juga telah menghilangkan harapan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hampir semua fasilitas pendidikan di Gaza rusak dan hancur akibat serangan militer dan hampir 745.000 pelajar di Gaza, termasuk 658.000 anak sekolah dan lebih dari 87.000 mahasiswa tidak mendapatkan pendidikan selama lebih satu tahun sejak awal konflik (World Bank Economic Monitoring Report 2025a).

Dalam sektor kesehatan, sejak awal konflik yang mulai pada Oktober 2023. Sektor kesehatan di Gaza mengalami kehancuran besar. Banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran serangan militer yang dilakukan oleh Israel. Pada Maret 2025, 49% rumah sakit dan 60% klinik kesehatan primer tidak beroperasi (World Bank Economic Monitoring Report 2025a). Sektor kesehatan di Gaza terus menghadapi tantangan operasional yang sangat serius, kerusakan parah pada fasilitas kesehatan, terbunuhnya tenaga medis, dan terhambat dalam bergerak di Jalur Gaza, sehingga adanya pembatasan masuknya pasokan medis dan bahan bakar kritis. Dengan

adanya hal ini, memaksa rumah sakit untuk membatasi sumber daya dan menghentikan layanan kritis. Selain itu, penyebaran penyakit menular meningkat dikarenakan sanitasi yang buruk, kurangnya air bersih, dan padatnya pengungsian. Kasus kelaparan dan malnutrisi juga meningkat, terutama pada anak-anak yang membutuhkan perawatan gizi. Akibat dari adanya konflik ini, semakin memperburuk kondisi sektor kesehatan, dan berisiko berhenti beroperasi total jika pasokan bahan bakar dan alat medis tidak segera terpenuhi (UNRWA Situation Report #182 2025)). Serangan militer yang dilakukan oleh Israel telah merusak 84% fasilitas kesehatan di Jalur Gaza, sehingga menghambat layanan medis bagi penduduk Palestina di Gaza menjadi sangat terbatas (Antara News 2025b).

Serangan militer Israel yang terus berlangsung di Gaza telah menargetkan berbagai lokasi, termasuk kamp-kamp pengungsi yang sangat padat. Serangan ini menyebabkan banyak korban sipil, termasuk anak-anak, serta kehancuran besar pada infrastruktur penting seperti rumah sakit dan kamp pengungsian. Kondisi ini memaksa warga sipil untuk mengungsi dalam waktu yang sangat singkat. Peringatan evakuasi yang dikeluarkan oleh Israel telah memicu kebingungan dan ketakutan di kalangan warga. Sejak Oktober 2023, militer Israel telah berulang kali mengeluarkan perintah evakuasi massal warga sipil di berbagai wilayah di Jalur Gaza sebelum meluncurkan serangan. Salah satu peringatan utama dikeluarkan pada 13 Oktober 2023, ketika warga di wilayah utara Gaza diperintahkan untuk mengungsi ke selatan dalam waktu 24 jam. Peringatan tersebut memicu kepanikan, kebingungan dan krisis pengungsian karena tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza (Gostoli 2023).

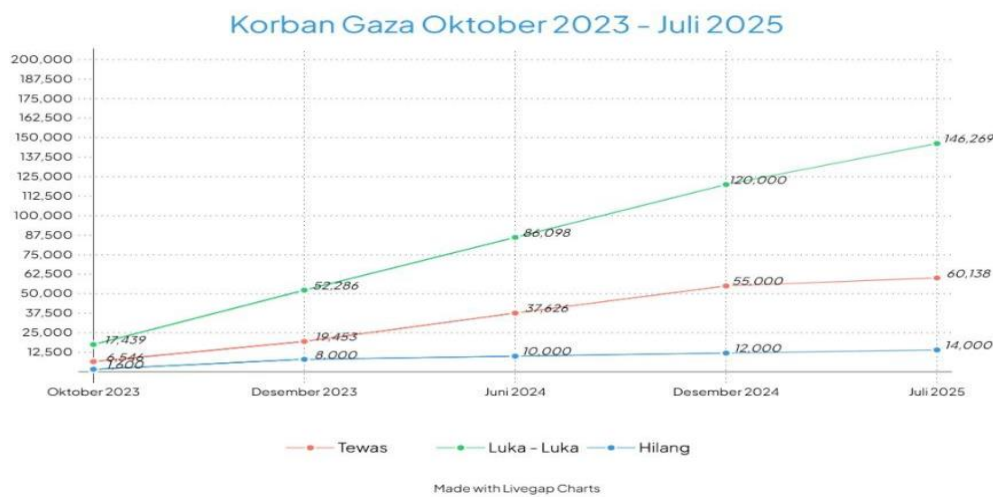
Selain itu, sepanjang 2024 dan 2025, perintah evakuasi juga terus diumumkan secara bertahap, mencakup wilayah-wilayah kamp pengungsi padat penduduk seperti Kota, Gaza, Jabaliya, Khan Younis, Rafah dan wilayah lainnya. Pada Juli 2024, militer israel memberikan perintah evakuasi di Khan Younis setelah serangan di sebuah sekolah yang menewaskan ratusan warga sipil yang berlindung di sana (AFP 2024). Pada Juli 2025, perintah evakuasi diperluas ke wilayah sekitar Kota Gaza, yang mencakup beberapa lingkungan kamp yang padat penduduk seperti kamp Jabaliya (Antara News 2025a).

Serangan Israel terhadap Palestina di Gaza telah berdampak besar dan menjadi tragedi krisis kemanusiaan di Gaza. Akibat dari serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa ada 232 orang tewas dan 1.697 lainnya luka-luka (UNRWA Situation Report #1 2023). Kemudian, dilakukannya pengusiran penduduk Palestina oleh Israel dan membatasi pergerakan pada penduduk Palestina dan Israel melakukan pembatasan penyaluran bantuan dasar kemanusiaan dan dilakukannya blokade terhadap wilayah Gaza, hal ini merupakan upaya yang dilakukan Israel untuk melemahkan populasi di Palestina (Azzahra et al. 2024b). Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina berdampak menjadi bencana krisis kemanusiaan di Gaza, serangan dari Israel yang terus menerus terjadi menyebabkan ribuan korban jiwa berguguran dan menghancurkan sebagian dari wilayah Gaza.

Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti tiga sekolah UNRWA terkena dampak dari adanya serangan yang dilakukan oleh Israel (UNRWA Situation Report #1 2023). Banyak warga Palestina yang mengungsi karena terkena dampak dari adanya

perang tersebut. Data dari *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), melaporkan angka pengungsian pada 7-10 Oktober 2023 mencapai angka 187.518 dari seluruh penduduk Palestina di Jalur Gaza (UNRWA Situation Report #1 2023). Semakin banyak warga sipil yang mencari perlindungan, Namun, kondisi yang terjadi sangat sulit untuk membantu para warga sipil yang terkena dampak. Angka korban terus meningkat seiring dengan serangan yang terus dilakukan oleh Israel.

Grafik 1. Jumlah Korban di Gaza Oktober 2023 - Juli 2025



Pada grafik diatas “Korban Gaza Oktober 2023-Juli 2025” menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban dalam kategori tewas, luka-luka, dan hilang selama hampir 2 tahun konflik. Korban tewas meningkat secara konsisten dari 6.546 pada Oktober 2023 menjadi lebih dari 60.000 pada Juli 2025. Korban luka-luka meningkat sangat tinggi, dari 17.439 menjadi sekitar 146.269 dalam periode yang sama, hal ini menandakan dampak besar terhadap warga sipil. Sementara itu, jumlah orang hilang juga terus bertambah, saat ini jumlah orang hilang sekitar 14.000. Namun, angka

tersebut belum bisa dipastikan karena orang hilang masih belum dapat dijangkau karena kesulitan untuk mengevakuasi para korban karena akibat serangan yang diluncurkan terus menerus oleh Israel. Grafik diatas menggambarkan peningkatan jumlah korban akibat konflik yang berkepanjangan di Gaza, jumlah korban terus meningkat dan banyak sekali warga sipil yang terdampak.

Pada Maret 2025, Israel telah memblokir seluruh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal ini menyebabkan penumpukan bantuan di luar wilayah Gaza yaitu khususnya di Al-Arish dan Mesir, karena tidak bisa disalurkan langsung ke warga yang membutuhkan. Pemblokiran yang dilakukan oleh Israel membuat kondisi semakin kritis, persediaan di dalam wilayah Gaza hampir habis, termasuk kebutuhan penting seperti obat-obatan, alat medis, bahan bakar, serta makanan dan air bersih.

Pada Juli 2025, WHO telah mengirimkan 10 truk bantuan medis ke Gaza (Metro TV 2025). Namun, bantuan yang ada masih belum cukup untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang terus meningkat akibat kerusakan parah pada sistem kesehatan, banyaknya korban luka, dan banyak warga yang kekurangan gizi. Para penduduk Palestina di Gaza menghadapi krisis kemanusiaan karena keterbatasannya akses bantuan kemanusiaan dan memperparah kondisi mereka.

Laporan terbaru dari IPC (*Integrated Food Security Phase Classification*) menunjukkan situasi pangan di Gaza sangat buruk, bahkan semakin parah sejak awal terjadinya konflik. Banyak keluarga di Gaza yang tidak makan sama sekali, dan hanya bisa mengonsumsi makanan seperti roti. Kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak kecil dibawah usia 5 tahun, wanita hamil, dan ibu menyusui. Sekitar 81%

keluarga melaporkan bahwa makanan yang mereka konsumsi sangat buruk, angka meningkat dari 33% pada bulan April 2025. (UNRWA Situation Report #182 2025).

Kematian akibat kurang gizi terus menerus bertambah, angka mencapai 74 kematian hingga akhir Juli 2025. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan ada 154 total kematian akibat kurang gizi sejak awal konflik, dan hampir separuh di antaranya adalah anak-anak (UNRWA Situation Report #182 2025). Data dari WHO antara Januari-Juni 2025 melaporkan bahwa setidaknya 19.089 anak berusia 6 hingga 59 bulan dirawat karena gizi buruk, lebih dari 100 anak per hari (World Health Organization, n.d.).

Gaza kini berada di ambang bencana kelaparan karena kekurangan makanan dan terus menerus memburuk. Penduduk Gaza mengalami krisis kemanusiaan yang sangat serius, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih dan kesehatan hampir tidak dapat terpenuhi. Situasi ini semakin diperparah oleh pemblokiran setiap bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan yang dilakukan oleh Israel sejak Maret 2025. Akibat dari blokade yang terus berlanjut di Gaza, kini menghadapi bencana kelaparan yang semakin parah. Jumlah kematian akibat kelaparan dan malnutrisi meningkat secara signifikan, terutama di kalangan anak-anak. Situasi kelaparan dan kekurangan makanan di Gaza sangat buruk. Banyak anak-anak dan keluarga yang harus menderita situasi tersebut, sementara bantuan yang dibutuhkan belum bisa masuk karena pemblokiran akses bantuan yang dilakukan oleh Israel semakin memperburuk situasi tersebut.

2.2. Operasional UNRWA di Gaza

2.2.1. Pembentukan dan Mandat UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) merupakan badan bantuan yang didirikan oleh PBB untuk menangani para penduduk dan pengungsi Palestina. UNRWA sebagai badan bantuan dibentuk melalui resolusi 302 (IV) tanggal 8 Desember 1949 dan telah beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1950 (Eric and Subramaniyan 2017).

Dalam melaksanakan programnya, UNRWA telah diberi mandat untuk melindungi dan layanan kepada para penduduk dan pengungsi Palestina. UNRWA memiliki mandat untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan tanpa memandang kewarganegaraan dan kebangsaan, memberikan dan menyediakan bantuan dasar kemanusiaan seperti layanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial, perawatan, tempat tinggal dan bantuan darurat bagi para pengungsi Palestina di wilayah operasinya yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, Jalur Gaza, dan Tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Awalnya mandat yang diberikan kepada UNRWA bersifat sementara dan hanya akan aktif selama satu tahun sampai ada solusi yang adil dan permanen untuk para penduduk dan pengungsi Palestina. Namun, setelah lebih dari tujuh puluh tahun, UNRWA masih terus aktif untuk memberikan layanan penting kepada pengungsi Palestina, sambil menunggu solusi yang adil tercapai (UNRWA 2022).

UNRWA masih terus aktif lebih dari satu tahun dari masa tugas yang ada karena situasi krisis yang ada dan situasi sulit di Gaza yang membutuhkan keberlangsungan bantuan kemanusiaan. Juru bicara UNRWA mengatakan bahwa

UNRWA terus berupaya untuk terus menyediakan layanan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Palestina di Gaza walaupun ada dampak dan tekanan yang berpengaruh pada operasional UNRWA (UN News 2025a).

2.2.2. Struktur Organisasi UNRWA

UNRWA dipimpin oleh Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini dan Wakil Komisaris Jenderal Antonia De Meo (Dukungan Operasional) dan Natalie Boucly (Program dan Kemitraan). Dalam struktur organisasi UNRWA untuk mengelola program kemanusiaan dalam pemberian bantuan dan layanan kepada pengungsi Palestina secara efektif di berbagai wilayah operasionalnya yaitu di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah (UNRWA, n.d.-a)

Dalam struktur UNRWA terdapat *Executive Office* (EO) yang membantu Komisaris Jenderal dan Wakil Komisaris Jenderal dalam perencanaan dan koordinasi semua manajemen yang ada di UNRWA. EO bertanggung jawab untuk mengawasi kantor lapangan, kantor perwakilan di berbagai lokasi, serta semua program dan departemen pendukung. EO memimpin dan mengelola perubahan besar dalam organisasi secara menyeluruh dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting, mendorong kerjasama di seluruh bagian UNRWA, serta menangani masalah dan berbagai resiko yang muncul dari internal maupun eksternal. Tugas EO mencakup beberapa bidang yang saling terkait, antara lain menentukan visi dan arah organisasi, mengatur struktur organisasi, tata kelola dan proses pengambilan keputusan, membuat kebijakan dan praktik kerja, mengawasi pelaksanaan operasional, melibatkan pemangku kepentingan di dalam organisasi serta melakukan advokasi dan bekerjasama dengan pihak luar dari organisasi (UNRWA, n.d.-a).

UNRWA juga memiliki departemen program yang mengelola berbagai layanan penting untuk mendukung pengungsi Palestina. Program-program utama tersebut yaitu, layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan infrastruktur dan kamp pengungsian, program keuangan mikro, divisi perlindungan, serta layanan bantuan dan sosial. Program tersebut telah dijalankan di lima wilayah operasi utama UNRWA yaitu, Yordania, Lebanon, Jalur Gaza, Suriah dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur (UNRWA, n.d.-a).

Selain departemen program, UNRWA memiliki departemen pendukung yang berfungsi untuk menjalankan operasional dan program secara efektif. Dalam departemen pendukung meliputi Hubungan Eksternal dan Komunikasi (*External Relations and Communications*), Keuangan (*Finance*), Manajemen Informasi (*Information Management*), Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), Hukum (*Legal Affairs*), Perencanaan (*Planning*), Keamanan dan Manajemen Resiko (*Security and Risk Management*), Divisi Dukungan Pusat (*Central Support Services*), serta Pengadilan Sengketa (*Dispute Tribunal*) (UNRWA, n.d.-a).

Kantor cabang UNRWA yang dipimpin oleh Direktur Urusan UNRWA (DUA) bertugas untuk memberikan arahan teknis dan operasional serta mengawasi dan memantau pelaksanaan program-program UNRWA di lapangan. Program tersebut terdapat dalam bidang pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, layanan sosial, infrastruktur, perbaikan kamp, dan mikro finansial. Kantor cabang juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana strategis, operasional dan anggaran di tingkat lapangan, menanggapi kebutuhan yang muncul,

dan bekerja langsung untuk mempengaruhi melindungi dan merawat pengungsi Palestina (UNRWA, n.d.-a).

2.2.3. Wilayah Operasi Kerja

UNRWA memiliki wilayah operasi kerja untuk membantu pengungsi Palestina yang membutuhkan perlindungan dan telah fokus dalam memberikan layanan kepada para pengungsi Palestina sejak tahun 1950 dan meliputi wilayah utama yaitu Yordania, Lebanon, Jalur Gaza, Suriah, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. UNRWA juga memiliki kantor pusat yang terdapat di Amman dan Gaza. Selain itu, UNRWA memiliki kantor lapangan di setiap wilayah operasinya, dan terdapat kantor perwakilan yang berada di New York, Washington DC, Brussels, dan Kairo. UNRWA telah melayani sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di wilayah operasinya yaitu Gaza, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Yordania, Lebanon, dan Suriah. UNRWA juga telah menyediakan layanan dasar pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, tempat tinggal, perawatan dan pinjaman keuangan mikro (UNRWA, n.d.-e).

2.2.4. Program Kerja dan Kegiatan UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) adalah badan bantuan PBB yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan layanan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina. UNRWA mempunyai mandat yang diakui oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya “pekerjaan berharga yang dilakukan oleh Badan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina, khususnya pengungsi Palestina”. Mandat ini mencakup untuk memberikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, tempat tinggal, perawatan dan bantuan darurat bagi pengungsi Palestina.

Dalam operasinya UNRWA memiliki mandat yaitu untuk memberikan bantuan dan layanan kepada para pengungsi Palestina. UNRWA memiliki mandat untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan tanpa memandang kewarganegaraan dan kebangsaan, memberikan dan menyediakan bantuan dasar kemanusiaan seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perawatan, tempat tinggal dan bantuan darurat bagi para pengungsi Palestina di wilayah operasionalnya. Mandat UNRWA secara khusus mencakup hak-hak kelompok rentan, perempuan, anak-anak dan orang disabilitas. Majelis Umum PBB juga mendorong UNRWA untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka dalam operasinya dan sesuai dengan instrumen internasional yang relevan, termasuk Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Orang Disabilitas (UNRWA, n.d.-b).

UNRWA memiliki lebih dari 30.000 staf, sebagian besar adalah warga Palestina sendiri, dan sebagian kecil adalah staf internasional. UNRWA secara aktif melibatkan warga Palestina dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional mereka. Keterlibatan warga Palestina sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai situasi sosial dan budaya di sekitar mereka, sehingga dapat memastikan layanan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Staf lokal tersebut mengisi berbagai posisi, seperti guru di sekolah-sekolah UNRWA, tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan, staf layanan sosial, serta staf administrasi dan pendukung (UNRWA, n.d.-f).

UNRWA telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan dalam operasinya dengan pengalaman lebih dari 75 tahun serta terdapat

32.000 personel di wilayah operasi yang sebagian besar terintegrasi dalam komunitas pengungsi. UNRWA terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pengungsi Palestina walaupun menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi di Gaza yang sangat terkena dampak konflik bersenjata (UNRWA, n.d.-b).

UNRWA bukan hanya bertugas mendirikan kamp atau memberikan bantuan darurat saja, melainkan memiliki bidang kerja yang sangat luas untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan pengungsi Palestina dalam jangka panjang. Selain menyediakan bantuan pangan dan kebutuhan dasar, UNRWA mengelola berbagai layanan penting yang meliputi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, program sosial dan program keuangan mikro.

Dalam bidang pendidikan, UNRWA telah mengoperasikan sekolah-sekolah bagi jutaan anak di Gaza, menyediakan pendidikan dasar dan menengah untuk anak-anak agar mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Saat ini, UNRWA telah mengelola 706 sekolah dasar di lima wilayah operasinya, melayani sekitar 543.075 siswa yang mendapatkan layanan pendidikan (UNRWA, n.d.-d). Layanan pendidikan yang diberikan oleh UNRWA tidak hanya pendidikan formal dasar dan menengah, tetapi juga termasuk pelatihan kejuruan dan pelatihan guru secara gratis. Siswa-siswa yang belajar di sekolah UNRWA mengikuti kurikulum dan menggunakan buku pelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan setempat. Selain itu, UNRWA juga melengkapi kurikulum dan materi pembelajaran tersebut dengan materi tentang hak asasi manusia (UNRWA, n.d.-d).

Dalam bidang kesehatan UNRWA juga telah menyediakan 140 fasilitas kesehatan yang melayani lebih dari 7 juta kunjungan pasien di setiap tahunnya, hal ini

memperlihatkan banyaknya program kesehatan yang dijalankan oleh UNRWA untuk mendukung pengungsi Palestina di berbagai wilayah operasionalnya. Selain layanan kesehatan rutin, UNRWA juga secara aktif telah melakukan respons darurat kesehatan dalam situasi konflik dan bencana, memberikan perawatan medis dasar dan khusus. UNRWA juga memberikan dukungan kesehatan mental yang sangat penting ditengah tekanan psikologis yang dialami banyak pengungsi akibat konflik (UNRWA, n.d.-d).

Selain layanan pendidikan dan kesehatan, UNRWA telah memberikan bantuan sosial seperti memberikan bantuan makanan, air bersih dan sanitasi, serta tempat tinggal untuk para pengungsi Palestina yang telah terkena dampak konflik Palestina-Israel. UNRWA juga telah mengelola 113 Pusat Perempuan dan Komunitas yang mendukung program sosial serta memberikan manfaat jaring pengaman sosial kepada sekitar 255.579 orang. UNRWA juga mempunyai program keuangan mikro dan telah memberikan total 475.905 pinjaman dengan nilai lebih dari 531 juta dolar AS, untuk membantu meningkatkan mata pencaharian para pengungsi Palestina yang terkena dampak konflik bersenjata (UNRWA, n.d.-e).

UNRWA juga telah berperan aktif dalam *Gaza Reconstruction Mechanism* (GRM) yang dibentuk pada 16 September 2014 oleh PBB, Pemerintah Otoritas Palestina, dan Pemerintah Israel sebagai respons atas kebutuhan besar rekonstruksi di Gaza pasca-konflik. GRM merupakan sebuah mekanisme yang mengatur arus masuk bahan bangunan terutama yang bersifat penggunaan ganda, yang memerlukan prosedur persetujuan multi-langkah dan pengawasan ketat oleh pihak internasional (Barakat et al. 2018).

Dalam mekanisme ini, UNRWA telah berperan aktif dengan memfasilitasi program perbaikan dan rekonstruksi tempat tinggal dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga pengungsi agar mereka dapat membeli bahan bangunan sendiri. UNRWA juga berkoordinasi dengan Pemerintah Otoritas Palestina untuk mengunggah data keluarga pengungsi ke dalam sistem GRM untuk mendapatkan izin oleh Pemerintah Israel. Meski sempat terjadi penghentian impor semen dan lonjakan harga semen, UNRWA tetap membantu keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat dengan mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan serta menyerahkannya kepada GRM untuk proses persetujuan dan UNRWA terus berupaya untuk memberikan bantuan agar program rekonstruksi dapat berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin (*Gaza Situation Report 145* 2016).

Operasional UNRWA sangat bergantung pada dukungan finansial dari negara-negara donor, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Prancis, yang menyediakan sumber dana utama untuk berbagai programnya. Namun, sejak konflik 2023, sejumlah negara donor utama menangguhkan dana mereka karena tuduhan keterlibatan staf UNRWA dengan Hamas. Penangguhan dana ini menimbulkan tekanan berat terhadap keberlanjutan layanan dan program bantuan yang sangat penting bagi jutaan pengungsi Palestina.

Selain tekanan pendanaan, UNRWA menghadapi berbagai hambatan lainnya seperti blokade Israel yang membatasi akses barang bantuan dan personel, kerusakan infrastruktur akibat serangan militer, dan ancaman terhadap keselamatan staf dan penduduk Palestina. Hambatan dalam memberikan bantuan karena adanya pembatasan dan keamanan yang buruk dapat menghambat distribusi bantuan

sehingga bantuan yang ada tidak efektif. Kondisi politik dan keamanan yang sulit juga dapat menghambat koordinasi UNRWA dengan pemerintah lokal dan internasional, sehingga menjadi tantangan untuk efektivitas operasional UNRWA di Gaza. Meski demikian, UNRWA terus berupaya keras untuk mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan bagi pengungsi, dengan adaptasi strategis terhadap kondisi lapangan yang sulit.

BAB 3

HAMBATAN UNRWA DI GAZA

Bab ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah diatas dan menguraikan 4 batasan utama yang menghambat aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh UNRWA di Gaza, yaitu batasan politis, organisasi, teknikal, dan komunitas. Keempat batasan yang ada bukan berarti sebagai batasan menyeluruh terhadap semua jenis hambatan yang mungkin ada, melainkan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan masalah-masalah utama yang mempengaruhi efektivitas kerja UNRWA. Peneliti akan mengaplikasikan dari teori *The Limits of Humanitarian Action* yang ditulis oleh Hugo Slim (2014) yang menunjukkan bahwa dalam realitas kemanusiaan terdapat berbagai batasan internal dan eksternal yang saling berkaitan dan menjadi hambatan dalam aksi kemanusiaan untuk mencapai tujuan kemanusiaan.

3.1. Hambatan Politik UNRWA di Gaza

Hambatan politik merupakan tantangan utama dalam operasional UNRWA di Gaza. Hambatan ini merujuk pada adanya politik anti-kemanusiaan yang menolak nilai-nilai kemanusiaan (Slim 2014). Hambatan politik tersebut tampak jelas dalam perang antara Palestina dan Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga Juli 2025. Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel dalam operasi yang disebut “Operasi Badai Al-Aqsa”. Serangan ini direspons oleh Israel dengan melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza yang menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur serta menewaskan dan mencederai ribuan warga Palestina.

Dalam konteks batasan politik menurut teori *The Limits of Humanitarian Action* dari Hugo Slim, Israel melakukan politik anti-kemanusiaan dengan melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, yang menyebabkan ribuan warga Palestina tewas dan luka-luka, disertai pengusiran paksa, pembatasan akses yang berujung pada kelaparan, serta penghancuran infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas penyediaan air bersih. Tindakan yang dilakukan Israel jelas telah melanggar prinsip perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

Politik antikemanusiaan yang diterapkan dalam konteks konflik ini sangat membatasi ruang gerak UNRWA sebagai badan PBB yang bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melindungi penduduk Palestina di Gaza. Serangan yang terus menerus berlanjut, blokade yang ketat, kerusakan infrastruktur dan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Israel menyulitkan UNRWA untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Banyak lokasi operasi dan distribusi bantuan menjadi sulit diakses dan bahkan berbahaya bagi staf UNRWA yang berupaya untuk melayani para penduduk Palestina. Dampaknya, UNRWA mengalami tantangan yang besar dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan penduduk Palestina di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan.

Selain adanya hambatan dalam politik antikemanusiaan, ada dampak dari pendanaan dalam hambatan politik. Selama ini, UNRWA sebagai badan kemanusiaan yang dianggap sebagai penyelamat bagi penduduk Palestina di Gaza, telah mengalami tuduhan bahwa pada 7 Oktober 2023 beberapa staff UNRWA kemungkinan terlibat dalam serangan Hamas (Al Jazeera 2024b). Tuduhan ini sangat mempengaruhi operasional UNRWA dan menghambat efektivitas operasional UNRWA. Setelah

penyelidikan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS), sembilan staf UNRWA diberhentikan karena adanya bukti kemungkinan terlibat dalam serangan tersebut. Akibat dari adanya tuduhan tersebut, beberapa negara Barat menghentikan pendanaan untuk UNRWA, dimulai dari negara Amerika Serikat yang menghentikan pendanaan untuk UNRWA kemudian dilanjutkan oleh beberapa negara seperti Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Finlandia, Estonia, Jepang, Austria, dan Rumania juga melakukan penghentian pendanaan untuk UNRWA (Al Jazeera 2024b). Penghentian pendanaan terhadap UNRWA menyebabkan tantangan yang besar bagi keberlangsungan operasional dan efektivitas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada penduduk Palestina di Gaza. Pendanaan yang berasal dari negara donor, terutama negara Barat merupakan sumber utama bagi UNRWA untuk tetap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penghentian pendanaan yang dilakukan negara-negara barat menyebabkan kesulitan bagi UNRWA untuk menjalankan operasionalnya (Al Jazeera 2024b).

Tantangan politik lainnya muncul dari adanya hambatan dalam negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang berdampak langsung pada krisis pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, terutama bahan bakar. Sejak militer Israel yang memasuki Rafah dan menutup perlintasan perbatasan Gaza-Mesir, pemerintah Mesir menanggapi langkah yang dilakukan oleh Israel dengan menolak izin masuk truk-truk pengangkut bahan bakar ke Gaza. Mesir telah menutup jalur bantuan melalui perlintasan Kerem Shalom sebagai bentuk penolakan terhadap operasi militer Israel yang dianggap telah mengancam keamanan wilayahnya. Keputusan Mesir ini telah memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza karena bahan bakar sangat penting bagi

kelangsungan hidup warga Palestina. Direktur UNRWA, Scott Anderson, menyampaikan kepada Politico bahwa tanpa bahan bakar mengharuskan UNRWA untuk memilih mana yang akan lebih diprioritaskan, apakah rumah sakit, toko roti atau pompa limbah karena semua pilihan tersebut penting. Sehingga, jika mengabaikan salah satunya akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi kehidupan di Gaza (Erin Banco 2024).

Operasional UNRWA juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Israel, adanya blokade dan pembatasan akses mempersulit UNRWA untuk menjalankan operasionalnya. Pada Oktober 2024, Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah Israel yang di duduki, termasuk Yerusalem Timur dan dilarang untuk berkomunikasi dengan pemerintah Israel. PBB mengatakan UNRWA akan terus bekerja di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur (Al Jazeera, n.d.-a). Pada undang-undang yang dikeluarkan oleh Israel larangan tersebut lebih difokuskan pada kantor dan operasi UNRWA di Yerusalem dan beberapa wilayah pendudukan Israel. Walaupun larangan tersebut lebih berfokus pada kantor dan operasi UNRWA di Yerusalem dan beberapa wilayah pendudukan Israel, namun membuat khawatir karena mungkin undang-undang tersebut dapat menghentikan semua operasi UNRWA di wilayah operasinya termasuk di Gaza (UN News 2025c).

Israel juga telah menutup jalur bantuan sejak 2 Maret 2025, UNRWA mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza telah terhenti. Blokade yang dilakukan Israel dengan menutup semua jalur akses untuk menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada para penduduk Palestina

di Gaza (CNN Indonesia 2025). Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel menghentikan masuknya barang dan pasokan ke Gaza karena diduga disalahgunakan oleh Hamas dengan mencurinya dan menghalangi warga Gaza untuk mendapatkannya serta menggunakan pasokan-pasokan tersebut untuk mendanai aktivitas teror yang ditujukan langsung kepada Israel dan warga sipilnya (VOA Indonesia 2025b). Namun, laporan internal dari USAID, badan pembangunan AS pada akhir Juni 2025 menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya pencurian bantuan kemanusiaan dan disalahgunakan oleh Hamas (Al Jazeera 2025a). Akibatnya, UNRWA tidak dapat menyalurkan bantuan kepada warga Palestina yang sangat bergantung pada UNRWA.

3.2. Hambatan Organisasi UNRWA di Gaza

Dalam konteks batasan organisasi menurut teori *The Limits of Humanitarian Action* dari Hugo Slim, UNRWA sebagai badan kemanusiaan menghadapi berbagai hambatan organisasi, terutama dalam hal koordinasi. UNRWA yang harus mengelola lebih dari 30.000 staf lokal dan internasional, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi PBB seperti OCHA, UNICEF, WFP, UNSCO dan NGO seperti IIRUSA dan WDF yang memiliki mandat, prosedur, dan prioritas berbeda. Perbedaan mandat dan prosedur ini dapat membuat koordinasi di lapangan menjadi sulit, karena proses pengambilan keputusan sering kali berfokus pada kesepakatan bersama, sehingga UNRWA sulit untuk menentukan kebijakan operasional secara mandiri dan memastikan pengambilan keputusan yang cepat. Kondisi ini menjadi hambatan bagi

UNRWA dalam merespons kebutuhan mendesak warga Palestina, karena koordinasi yang sulit dapat memperhambat proses penyaluran bantuan.

UNRWA juga menghadapi tantangan yang sulit karena statusnya yang merupakan sebuah badan kemanusiaan yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena statusnya sebagai bagian dari lembaga PBB, independensi UNRWA sering dipertanyakan, khususnya dalam kondisi perang yang sangat sensitif di wilayah Palestina-Israel. Salah satu tantangan besar menyangkut internal, yaitu reputasi independensi UNRWA, yang terjadi setelah serangan yang pada 7 Oktober 2023. Dugaan keterlibatan staff UNRWA pada perang tersebut memicu penyelidikan terhadap 19 staff, yang dilakukan atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB melalui Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS) (UNRWA, n.d.-c). Pada 5 Agustus OIOS menyelesaikan penyelidikan dan menemukan bahwa dalam satu kasus tidak ada bukti yang mendukung, dalam sembilan kasus lainnya bukti yang ada dianggap tidak cukup, sementara dalam sembilan kasus lainnya terdapat bukti yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan staf dalam serangan tersebut (UNRWA, n.d.-c).

Selain itu, PBB juga menanggapi adanya permasalahan terkait netralitas UNRWA. Sekretaris Jenderal PBB memulai pembentukan sebuah panel independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap netralitas dan independensi UNRWA. Panel ini dipimpin oleh Mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna (VOA Indonesia 2024c). Hasil evaluasi tersebut menemukan beberapa masalah yang mempengaruhi netralitas UNRWA. Dalam laporan yang disampaikan oleh VOA Indonesia, Colonna menjelaskan bahwa adanya beberapa contoh yang menunjukkan

adanya permasalahan terhadap prinsip netralitas. Pertama, perilaku staff UNRWA yang dianggap melakukan keberpihakan secara terbuka di depan publik dengan menunjukkan sikap atau aktivitas yang dianggap mendukung pihak tertentu dalam konflik Palestina-Israel dalam keberpihakan ini bisa seperti pernyataan publik atau perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap satu pihak politik atau militan. Kedua, materi pelajaran di buku-buku sekolah yang digunakan dalam program pendidikan UNRWA yang mengandung materi bermasalah seperti adanya buku pelajaran yang digunakan di sekolah UNRWA memuat bahasa yang bersifat anti-Yahudi atau anti-Israel, komisi tersebut melaporkan bahwa tinjauan terbaru terhadap buku-buku dari Otoritas Palestina pada tahun 2022-2023 menemukan bahwa sekitar 3,85% dari total halaman mengandung materi yang menimbulkan kekhawatiran terkait dengan nilai, pedoman, atau sikap resmi PBB mengenai konflik tersebut. Ketiga, adanya serikat staf yang dipolitisasi, yang seharusnya berfokus pada kepentingan dan perlindungan hak-hak staf, malah terpengaruh atau digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini akan mengganggu operasional dan mempengaruhi tata kelola manajemen UNRWA (VOA Indonesia 2024a).

Selain tantangan yang dihadapi UNRWA di atas, terdapat pula tantangan lain yang berkaitan dengan keterbatasan UNRWA dalam merekrut para anggota staf kemanusiaannya. UNRWA memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan mayoritas stafnya adalah penduduk Palestina yang di wilayah operasionalnya. Dalam operasinya di Jalur Gaza, UNRWA sebagian besar merekrut staf lokal dari penduduk Palestina yang menerima bantuan mereka (UNRWA, n.d.-g). Pilihan ini dilakukan karena alasan keamanan, pengetahuan bahasa, dan pemahaman budaya lokal sehingga dapat

memudahkan pelaksanaan tugas dan komunikasi dengan para pengungsi. Namun, merekrut staf dari penduduk lokal juga menghadapi tantangan, khususnya terkait kekhawatiran bahwa beberapa kandidat mungkin terafiliasi dengan kelompok seperti Hamas atau lembaga lainnya. Kekhawatiran ini menyebabkan tantangan dalam proses perekrutan. Tantangan tersebut dapat menghambat UNRWA karena adanya risiko bahwa staf yang telah direkrut bisa saja terpengaruh oleh kepentingan politik atau militan, yang berpotensi akan merusak netralitas dan integritas UNRWA dalam menjalankan operasionalnya.

Selain itu, UNRWA juga menghadapi hambatan dalam merekrut staf internasional karena adanya pembatasan visa dan izin kerja yang diberlakukan oleh Israel, yang mengontrol akses ke Gaza (UN News 2025b). Pembatasan ini menghambat UNRWA untuk merekrut staf internasional yang berguna untuk mendukung operasi UNRWA. Staf internasional seringkali terbatas jumlahnya dan kewenangannya, sehingga UNRWA sangat bergantung dengan staf lokal yang menghadapi risiko dan tekanan.

3.3. Hambatan Teknikal UNRWA di Gaza

Dalam konteks batasan teknis menurut teori *The Limits of Humanitarian Action* dari Hugo Slim, hambatan teknis muncul ketika organisasi kemanusiaan menghadapi keterbatasan operasional yang tidak bisa diatasi hanya dengan keahlian atau pengetahuan. Di Gaza, UNRWA mengalami hambatan teknis dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan yang bergantung pada izin dari pihak Israel yang mengontrol perbatasan Gaza.

UNRWA menerima bantuan berupa barang-barang kebutuhan dasar manusia seperti makanan, obat-obatan dan perlengkapan medis dari berbagai negara dan pihak donatur. Bantuan tersebut dikirimkan dan disimpan di gudang penyimpanan yang berada di sekitar wilayah Gaza, seperti Mesir dan Yordania. UNRWA memiliki sistem pengelolaan pengiriman bantuan yang digunakan untuk menyalurkan barang tersebut ke seluruh Gaza melalui jaringan kantor lapangan dan titik distribusi yang tersebar di Gaza.

Lokasi distribusi bantuan UNRWA di Gaza tersebar di beberapa daerah yang sangat padat penduduk dan memiliki kebutuhan kemanusiaan yang besar. Titik-titik distribusi utama meliputi Kamp Pengungsi Jabaliya di Gaza Utara, yang merupakan kamp terbesar dan terpadat di wilayah itu. Selain itu, Kota Gaza sebagai pusat kota sangat padat dan menjadi lokasi penting lain untuk distribusi bantuan. Di bagian selatan Gaza, Khan Younis dan Rafah yang merupakan wilayah padat penduduk juga menjadi tempat untuk distribusi bantuan. UNRWA mengoperasikan lebih dari 400 titik distribusi di seluruh Gaza, yang tersebar di kamp-kamp dan wilayah padat lainnya untuk menjangkau jutaan penduduk yang sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan ini.

Kerusakan infrastruktur yang parah di Gaza, terutama bangunan perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, menjadi hambatan teknis signifikan bagi UNRWA dalam menjalankan operasionalnya. Berdasarkan penilaian UNOSAT per 8 Juli 2025, total 192.812 bangunan terdampak, termasuk 102.067 bangunan hancur total dan 17.421 bangunan rusak parah, mencakup sekitar 78% dari total bangunan yang ada di Jalur Gaza, dengan kerusakan paling berat berada di Kota Gaza, Rafah, Khan

Younis, Jabalya dan Beit Lahiya (OCHA 2025). Tingginya jumlah bangunan yang hancur dapat mengganggu distribusi bantuan UNRWA, karena banyak area yang sebelumnya digunakan sebagai titik distribusi atau fasilitas pendukung kini tidak dapat diakses.

Selain itu, hampir 91,8% dari 564 sekolah telah mengalami kerusakan, termasuk sekolah UNRWA yang juga difungsikan sebagai tempat penampungan pengungsi (OCHA 2025). Kerusakan pada fasilitas ini membatasi kapasitas UNRWA untuk menyediakan pendidikan dan menampung warga yang mengungsi akibat perang.

Banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi sasaran serangan Israel. Tercatat 772 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza, yang berdampak pada 125 fasilitas, termasuk 34 rumah sakit dan 197 ambulans. Kekurangan bahan bakar juga telah membuat banyak fasilitas medis hanya bisa beroperasi dengan jadwal terbatas, sehingga layanan darurat dan perawatan malam menjadi sangat terganggu. Ditambah lagi, kekurangan pasokan obat-obatan dan staf medis semakin menghambat sistem kesehatan (UNICEF 2025). Hal ini, dapat menghambat kemampuan UNRWA untuk mendukung layanan kesehatan dan mendistribusikan bantuan medis.

Serangan yang dilakukan oleh Israel sejak awal konflik hingga Juli 2025 juga telah menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap staf kemanusiaan UNRWA di Gaza. Dikonfirmasi bahwa lebih dari 340 staff UNRWA telah menjadi korban tewas saat menjalankan tugasnya dalam serangan ini (UNRWA Situation Report #182 2025). Kondisi ini menyebabkan tantangan bagi operasional UNRWA dalam menyalurkan bantuan dan layanan kemanusiaan. Tingginya risiko yang dihadapi para pekerja

kemanusiaan ini sangat berdampak pada kemampuan UNRWA untuk memenuhi kebutuhan mendesak jutaan pengungsi yang bergantung pada mereka.

Israel mengubah mekanisme distribusi bantuan yang ada sebelumnya dengan mengalihkan penyaluran bantuan ke organisasi yang dikendalikannya, yaitu *Gaza Humanitarian Foundation* (GHF). GHF mengganti peran distribusi bantuan yang sebelumnya dilakukan oleh UNRWA. Organisasi ini didirikan dengan dukungan Israel dan Amerika Serikat, dan mulai beroperasi pada Mei 2025 dengan tujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza. GHF mengganti peran distribusi bantuan yang sebelumnya dilakukan oleh UNRWA (Al Jazeera 2025b).

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Juliette Touma selaku Direktur Komunikasi dan Media UNRWA menyatakan saat ini ada sekitar 6.000 truk bantuan berisi kebutuhan dasar rakyat Palestina, dan tertahan di perbatasan Mesir dan Yordania yang tidak dapat masuk ke Gaza karena kebijakan pembatasan oleh Israel. Mekanisme distribusi bantuan yang baru dikelola oleh Israel yaitu *Gaza Humanitarian Foundation* (GHF), dinilai telah gagal total oleh Touma. Sistem baru ini hanya mengoperasikan empat titik distribusi, sangat jauh dibandingkan dengan lebih dari 400 titik yang sebelumnya dioperasikan UNRWA, sehingga hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk Palestina di Gaza. Kondisi di Gaza sekarang lebih buruk dibandingkan sebelum perang, kehancuran infrastruktur yang sangat tinggi, hilangnya rasa aman, dan runtuhnya sistem kehidupan warga Gaza. Selama ini, warga Gaza bertahan dengan bantuan UNRWA dan kini menghadapi krisis kemanusiaan seperti kelaparan akut, malnutrisi, dan kurangnya kebutuhan dasar kemanusiaan. Touma menyerukan agar bantuan dibuka kembali secara aman, cepat, dan tanpa hambatan dengan mengaktifkan

kembali mekanisme distribusi yang lama dan memungkinkan ratusan truk masuk setiap hari di bawah koordinasi PBB dan UNRWA (UNRWA 2025). Dalam wawancara ini, menggambarkan betapa rumitnya tantangan yang dihadapi oleh UNRWA dalam distribusi bantuan, terutama setelah mekanisme distribusi bantuan dialihkan ke GHF. Hal ini menyebabkan UNRWA tidak dapat menyalurkan bantuan secara efektif, sehingga memperburuk krisis yang dihadapi jutaan pengungsi di Gaza.

3.4. Hambatan Komunitas UNRWA di Gaza

UNRWA merupakan organisasi bantuan kemanusiaan yang selama ini telah melayani penduduk Palestina di Gaza sejak 1950. Hampir seluruh penduduk Palestina di Gaza sangat bergantung pada UNRWA untuk berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, air, dan perlengkapan lainnya (Al Jazeera, n.d.-b). Sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, sekitar satu juta warga Palestina di Gaza atau hampir 45% dari populasi wilayah tersebut, telah berlindung di sekolah, klinik dan gedung-gedung milik UNRWA lainnya (Al Jazeera, n.d.-b). UNRWA selama ini telah dipandang sebagai penyelamat bagi para penduduk, terutama di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di Gaza. Sebagai salah satu badan kemanusiaan internasional, UNRWA saat ini terus konsisten memberikan layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh para penduduk Palestina, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan penting lainnya. Dalam kondisi bersenjata yang terus berlanjut hingga saat ini, kehadiran UNRWA menjadi tumpuan bagi penduduk Palestina untuk terus bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Palestina di Gaza memandang keberadaan UNRWA

sangat penting dan sangat bergantung pada organisasi ini di tengah situasi yang penuh tekanan dan ancaman terhadap keselamatan mereka.

Lebih dari satu juta penduduk Palestina diperkirakan hidup dalam kondisi kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penduduk Palestina yang tinggal di Jalur Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di bawah blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun. Dalam situasi sulit ini, UNRWA hadir sebagai penyedia utama berbagai layanan penting. Badan kemanusiaan ini memberikan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan, menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di Gaza agar tetap memperoleh hak atas pendidikan yang layak, serta menjalankan program pembangunan ekonomi dengan mendukung wirausahawan lokal dan menyediakan layanan keuangan mikro bagi masyarakat. Selain itu, UNRWA juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk Palestina dengan membangun kamp-kamp perlindungan, serta mengembangkan fasilitas pembuangan limbah dan sistem drainase (UN News 2024).

Ketergantungan penduduk Palestina terhadap UNRWA menjadi salah satu hambatan dalam operasional organisasi ini. Karena sebagian besar warga Gaza sangat bergantung pada UNRWA untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Hal ini, membuat UNRWA memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bantuan disalurkan secara lancar dan efektif. Ketergantungan ini menjadi dapat menghambat operasional UNRWA, terutama ketika menghadapi hambatan seperti pembatasan akses, kerusakan infrastruktur, atau perubahan mekanisme distribusi bantuan. Jika bantuan tidak dapat

tersalurkan dengan lancar, ketergantungan penduduk Palestina pada UNRWA dapat semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Situasi keamanan yang buruk di Gaza juga telah menjadi hambatan komunitas bagi UNRWA dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ribuan ton makanan, obat-obatan dan bahan bantuan lainnya yang didatangkan melalui dermaga buatan AS ke pesisir Gaza tidak sampai kepada yang membutuhkan karena kondisi yang sangat sulit. Dilansir dari VOA Indonesia, seorang pejabat dari badan bantuan kemanusiaan Amerika Serikat, USAID menyatakan bahwa para pengemudi truk terjebak dalam baku tembak dan muatan mereka disita oleh kelompok-kelompok yang beroperasi seperti geng. Kondisi ini menunjukkan hilangnya penegakan hukum dan keamanan di Gaza, yang masih menjadi zona perang sehingga memicu kekacauan dan putus asa bagi warga Palestina. (VOA Indonesia 2024d).

Adanya penjarahan bantuan oleh warga yang putus asa dan kelompok kriminal juga memperburuk situasi, dapat menimbulkan konflik sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses bantuan (VOA Indonesia 2024d). Hal ini menjadi hambatan langsung bagi UNRWA karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukannya keamanan dan pengawasan yang ketat agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, tanpa disalahgunakan atau hilang selama proses distribusi. Ketidakstabilan keamanan di Gaza tidak hanya menghambat distribusi bantuan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko bagi staf UNRWA dan relawan yang ada di lapangan, sehingga membatasi kemampuan dalam melakukan operasi kemanusiaan.

UNRWA juga melibatkan warga Palestina dalam operasionalnya, terutama melalui perekrutan staff lokal. Mayoritas staff UNRWA di Gaza adalah penduduk Palestina setempat yang membantu menjalankan berbagai program dan layanan, ada yang menjadi guru, tenaga medis, staf layanan sosial serta staf administrasi dan pendukung (UNRWA, n.d.-d). Namun, serangan Israel yang menargetkan sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik tempat staf lokal UNRWA bekerja secara langsung dan mengancam keselamatan mereka. Situasi ini menjadi hambatan bagi UNRWA, karena staf lokal berperan sebagai penghubung utama antara UNRWA dan warga Palestina, ancaman yang ada terhadap mereka dapat menghambat UNRWA untuk menyalurkan bantuan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata antara Palestina dan Israel yang memuncak sejak Oktober 2023 hingga Juli 2025 telah memberikan dampak kemanusiaan yang sangat besar, terutama terhadap penduduk Palestina yang berada di Gaza, serta banyaknya infrastruktur yang hancur akibat konflik tersebut. UNRWA merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina. Namun, UNRWA dalam menjalankan mandatnya menghadapi berbagai hambatan, termasuk serangan militer israel yang terus menerus, pembatasan akses wilayah, serta adanya pemotongan dana oleh negara-negara donor akibat tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam konflik.

Dalam menganalisis hambatan yang dialami oleh UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza, terdapat lima faktor batasan dalam aksi kemanusiaan menurut Hugo Slim yang perlu diidentifikasi yaitu batasan politik, organisasi, teknikal, komunitas dan moral, namun dalam hal ini penulis hanya memakai empat faktor batasan yang relevan dengan studi kasus tersebut. Keempat aspek tersebut menjadi landasan dalam memahami hambatan yang dialami oleh UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza.

Pada batasan politik, dapat disimpulkan bahwa hambatan politik merupakan tantangan paling signifikan bagi UNRWA dalam menjalankan mandat

kemanusiaannya di Gaza pasca konflik 7 Oktober 2023. Politik antikemanusiaan yang diterapkan Israel melalui serangan militer, blokade, pengusiran paksa, dan penghancuran infrastruktur telah membatasi ruang gerak UNRWA. Selain itu, tuduhan keterlibatan staf UNRWA dengan Hamas memicu penghentian pendanaan dari berbagai negara donor yang selama ini menjadi sumber utama operasional UNRWA. Hambatan politik lainnya juga muncul dari sulitnya negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang berdampak pada krisis pengiriman bantuan karena Mesir menutup jalur perbatasan. Ditambah lagi, kebijakan Israel yang melarang operasi UNRWA di wilayah tertentu serta penutupan jalur bantuan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Pada batasan organisasi, UNRWA menghadapi tantangan internal organisasi. Kesulitan koordinasi dengan lebih dari 30.000 staf, serta berbagai lembaga PBB dan NGO dengan mandat yang berbeda, sering kali memperlambat pengambilan keputusan. Status UNRWA sebagai badan PBB juga membuat independensi dan netralitasnya dipertanyakan, terutama setelah adanya tuduhan keterlibatan staf dalam konflik 7 Oktober 2023 yang memicu investigasi dan evaluasi. Selain itu, permasalahan netralitas muncul dari perilaku staf, materi ajar di sekolah, serta serikat pekerja yang dipolitisasi. Proses perekrutan staf lokal juga menghadapi risiko terafiliasi dengan kelompok seperti Hamas, sementara pembatasan visa dari Israel menghambat perekrutan staf internasional.

Pada batasan teknis, UNRWA mengalami kendala operasional di Gaza, mencakup kerusakan infrastruktur, hancurnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, terbatasnya akses, serta korban jiwa di kalangan staf UNRWA. Mekanisme distribusi

bantuan yang dialihkan ke GHF juga terbukti tidak efektif, sehingga semakin memperburuk krisis kemanusiaan.

Pada batasan komunitas, UNRWA telah menghadapi hambatan karena tingginya ketergantungan warga Gaza pada bantuan, keamanan yang buruk, serta kerentanan staf lokal. Penjarahan, baku tembak dan lemahnya penegakan hukum sering menghambat distribusi bantuan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, serangan Israel terhadap fasilitas publik juga mengancam keselamatan staf lokal.

Secara keseluruhan, konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi sejak Oktober 2023 hingga Juli 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar dan membuat UNRWA sebagai organisasi kemanusiaan menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan mandat kemanusiaannya di Gaza. Mulai dari adanya batasan politik, batasan organisasi, batasan teknis dan batasan hambatan, batasan-batasan tersebut saling memperkuat untuk membatasi efektivitas peran UNRWA. Meskipun UNRWA menghadapi hambatan yang sangat sulit dalam menjalankan operasinya, UNRWA tetap menjadi tumpuan hidup penting bagi jutaan penduduk Palestina di Gaza, hal ini menegaskan pentingnya dukungan dan kerja sama internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara adil, efektif, dan tanpa hambatan di tengah situasi konflik yang sulit ini.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian skripsi ini tentu memiliki keterbatasan, baik dalam isi maupun hasil penelitian. Pertama, subjek penelitian ini adalah UNRWA sehingga pada penelitian ini hanya berfokus pada hambatan UNRWA dalam menangani penduduk

Palestina di Gaza. Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya, dapat memperluas fokus dengan mengkaji peran organisasi internasional lain selain UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina di Gaza. Kedua, peneliti dalam penelitian ini hanya fokus membahas hambatan UNRWA dalam menangani penduduk Palestina di Gaza. Dengan itu maka peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya meneliti wilayah konflik lain atau wilayah Palestina lainnya. Ketiga, pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada isu yang terjadi di Oktober 2023 hingga Juli 2025, oleh karena itu akan memungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas keterbaruan dari situasi dan respons UNRWA.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. 2024. "Militer Israel Perintahkan Evakuasi Sebagian Khan Younis Usai Serangan Roket." VOA Indonesia, July 22. <https://www.voaindonesia.com/a/militer-israel-perintahkan-evakuasi-sebagian-khan-younis-usai-serangan-roket/7707801.html>.
- Al Jazeera. 2023. "What Happened in Israel? A Breakdown of How Hamas Attack Unfolded | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera." July 10. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded>.
- Al Jazeera. 2024a. "Which countries have cut funding to UNRWA, and why?" Al Jazeera, January 31. <https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2024/1/28/which-countries-have-cut-funding-to-unrwa-and-why>.
- Al Jazeera. 2024b. "Which countries have cut funding to UNRWA, and why?" Al Jazeera, January 31. <https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2024/1/28/which-countries-have-cut-funding-to-unrwa-and-why>.
- Al Jazeera. 2025a. "Israel says it's distributing aid in Gaza, so why are people starving?" July 26. <https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2025/7/26/israel-says-its-distributing-aid-in-gaza-so-why-are-people-starving>.
- Al Jazeera. 2025b. "What is the Gaza Humanitarian Foundation, and why has it been criticised?" Al Jazeera, May 20. <https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2025/5/20/what-is-the-gaza-humanitarian-foundation-and-why-has-it-been-criticised>.
- Al Jazeera. n.d.-a. "Israel's ban on UNRWA comes into effect despite backlash." Accessed August 5, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/30/israels-ban-on-unrwa-comes-into-effect-despite-backlash>.
- Al Jazeera. n.d.-b. "What is UNRWA and why is it important for Palestinians?" Accessed August 18, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/what-is-unrwa-and-why-it-is-important-for-palestinians>.
- Antara News. 2025a. "Israel perbarui perintah evakuasi bagi kota Gaza." Antara News, July 15. <https://www.antaranews.com/berita/4968813/israel-perbarui-perintah-evakuasi-bagi-kota-gaza>.

- Antara News. 2025b. "WHO: 94 persen rumah sakit di Gaza hancur atau rusak akibat Israel." Indonesia. *Antara News*, May 23. <https://www.antaraneews.com/berita/4852989/who-94-persen-rumah-sakit-di-gaza-hancur-atau-rusak-akibat-israel>.
- Azzahra, Nisfah, Ujang Hibar, Mohammad Hifni, and Yosi Lutfi Amelia. 2024a. *TINDAKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (GENOSIDA) YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA*. 4 (10).
- Azzahra, Nisfah, Ujang Hibar, Mohammad Hifni, and Yosi Lutfi Amelia. 2024b. *TINDAKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (GENOSIDA) YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA*. 4 (10).
- Barakat, Sultan, Sansom Milton, and Ghassan Elkahlout. 2018. "The Gaza Reconstruction Mechanism: Old Wine in New Bottlenecks." *Journal of Intervention and Statebuilding* 12 (2): 208–27. <https://doi.org/10.1080/17502977.2018.1450336>.
- Bartholomeusz, L. 2009. "The Mandate of UNRWA at Sixty." *Refugee Survey Quarterly* 28 (2–3): 452–74. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdp033>.
- Bocco, Riccardo, (Guest Editor). 2009. "UNRWA and the Palestinian Refugees: A History within History." *Refugee Survey Quarterly* 28 (2–3): 229–52. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdq001>.
- CNN Indonesia. 2025. "UNRWA: Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Terhenti Sejak 2 Maret." *CNN Indonesia*, April 18. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250418150931-120-1220134/unrwa-bantuan-kemanusiaan-ke-gaza-terhenti-sejak-2-maret>.
- Dalimunthe, Aidil Putra, and Noor Azizah. 2024. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam." *JATISWARA* 39 (3): 353–67. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1151>.
- Eric, Niyigena Mugabo, and Dr. J Subramaniyan. 2017. "International Journal of Advanced Research and Development." *The Role of United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for Protecting Palestinian Refugees* 2 (5): 492–96. <https://doi.org/10.22271/advanced>.
- Erin Banco. 2024. "Egypt Aid Restrictions Are Complicating Gaza Cease-Fire Negotiations - POLITICO." *Politico*, May 21. <https://www.politico.com/news/2024/05/21/egypt-aid-restrictions-gaza-ceasefire-negotiations-00159249>.
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/profile/Anita->

Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. 2019. "The Changing Faces of UNRWA: From the Global to the Local." *Journal of Humanitarian Affairs. Journal of Humanitarian Affairs* 1 (1): 28–41. <https://doi.org/10.7227/JHA.004>.

Gaza Situation Report 145. 2016. <https://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-145>.

Gostoli, Ylenia. 2023. "'Nowhere Safe to Go': Confusion, Fear after Israel's Warning to Evacuate." *Al Jazeera*, October 13. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/nowhere-safe-to-go-confusion-fear-after-israels-warning-to-evacuate>.

Hamdan, Ayat. 2024. "The Israeli War Against UNRWA and Its Impact on Palestinian Refugees - ??? ? ????? ???? ?????? ?????? ?? ????????? ??????????" *Al-Muntaqa: New Perspectives on Arab Studies* 7 (1): 91–98.

Metro TV. 2025. "WHO Kirim 10 Truk Bantuan Medis ke Gaza di Tengah Krisis Kesehatan yang Memburuk." <https://www.metrotvnews.com>. <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnxpA-who-kirim-10-truk-bantuan-medis-ke-gaza-di-tengah-krisis-kesehatan-yang-memburuk>.

Nurjannah, Emilia Palupi, and M. Fakhruddin. 2019. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina." *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1 (1): 1. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479>.

OCHA. 2025. "Humanitarian Situation Update #311 | Gaza Strip." United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, August 6. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-311-gaza-strip>.

Slim, Hugo. 2014. "The Limits of Humanitarian Action." In *The Handbook of Global Health Policy*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118509623.ch18>.

Taufiqurokhman, and K. M. S. Herman. 2024. "KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23 (1): 1. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.540>.

UN News. 2024. "How Has the War in Gaza Affected UNRWA's Ability to Support Palestinians? | UN News." June 11. <https://news.un.org/en/story/2024/11/1156606>.

- UN News. 2025a. "Israel's New Laws Banning UNRWA Already Taking Effect." January 29. <https://news.un.org/en/story/2025/01/1159586>.
- UN News. 2025b. "Israel's New Laws Banning UNRWA Already Taking Effect." January 29. <https://news.un.org/en/story/2025/01/1159586>.
- UN News. 2025c. "Undang-undang baru Israel yang melarang UNRWA sudah mulai berlaku." January 29. <https://news.un.org/en/story/2025/01/1159586>.
- UNICEF. 2025. *UNICEF State of Palestine Humanitarian Situation Report No. 41, 31 July 2025 | UNICEF*. <https://www.unicef.org/documents/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-no-41-31-july-2025>.
- UNRWA. 2022. "About UNRWA - 2022 | UNRWA." <https://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/about-unrwa-2022>.
- UNRWA. 2024. *Restoring Learning for Children in Gaza*. <https://www.unrwa.org/newsroom/photos/education-under-attack>.
- UNRWA, dir. 2025. *Interview with Juliette Touma, UNRWA Director of Communications, Al Jazeera*. July 11. 05:31. <https://www.youtube.com/watch?v=PgHs6rrejY0>.
- UNRWA. n.d.-a. "Organizational Structure." Accessed July 23, 2025. <https://www.unrwa.org/who-we-are/organizational-structure>.
- UNRWA. n.d.-b. "Protection." Accessed July 24, 2025. <https://www.unrwa.org/what-we-do/protection>.
- UNRWA. n.d.-c. "UNRWA: Claims Versus Facts." Accessed August 16, 2025. <https://www.unrwa.org/unrwa-claims-versus-facts-2025>.
- UNRWA. n.d.-d. "What We Do UNRWA." Accessed July 24, 2025. <https://www.unrwa.org/what-we-do>.
- UNRWA. n.d.-e. "Where We Work UNRWA." Accessed July 24, 2025. <https://www.unrwa.org/where-we-work>.
- UNRWA. n.d.-f. "Working at UNRWA." Accessed September 23, 2025. <https://www.unrwa.org/careers/working-unrwa>.
- UNRWA. n.d.-g. "Working at UNRWA." Accessed August 16, 2025. <https://www.unrwa.org/careers/working-unrwa>.
- UNRWA Situation Report #1. 2023. "UNRWA Situation Report # 1 on the Situation in the Gaza Strip." UNRWA, July 10.

<https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-1-situation-gaza>.

UNRWA Situation Report #182. 2025. *UNRWA Situation Report #182 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, Including East Jerusalem*. <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-182-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>.

VOA Indonesia. 2024a. "Investigasi Independen Temukan Netralitas Badan PBB UNRWA Kuat." VOA Indonesia, April 23. <https://www.voaindonesia.com/a/investigasi-independen-temukan-netralitas-badan-pbb-unrwa-kuat/7581034.html>.

VOA Indonesia. 2024b. "Israel Beritahu PBB soal Penghentian Kerja Sama dengan Badan Bantuan Palestina PBB." VOA Indonesia, November 4. <https://www.voaindonesia.com/a/israel-beritahu-pbb-soal-penghentian-kerja-sama-dengan-badan-bantuan-palestina-pbb-/7850443.html>.

VOA Indonesia. 2024c. "Sekjen PBB Tunjuk Kelompok Independen untuk Evaluasi UNRWA." VOA Indonesia, February 6. <https://www.voaindonesia.com/a/sekjen-pbb-tunjuk-kelompok-independen-untuk-evaluasi-unrwa/7472664.html>.

VOA Indonesia. 2024d. "Situasi Keamanan Buruk di Lapangan Halangi Distribusi Bantuan di Gaza." VOA Indonesia, June 27. <https://www.voaindonesia.com/a/situasi-keamanan-buruk-di-lapangan-halangi-distribusi-bantuan-di-gaza/7675426.html>.

VOA Indonesia. 2025a. "Gaza Hadapi Tantangan Rekonstruksi Bernilai Miliaran Dolar." VOA Indonesia. VOA Indonesia, January 20. <https://www.voaindonesia.com/a/gaza-yang-luluh-lantak-akibat-perang-hadapi-tantangan-rekonstruksi-senilai-1-2-miliar-/7943129.html>.

VOA Indonesia. 2025b. "Israel Blokir Bantuan ke Gaza, Hamas Tuduh Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata." VOA Indonesia, March 4. <https://www.voaindonesia.com/a/israel-blokir-bantuan-ke-gaza-hamas-tuduh-israel-langgar-perjanjian-gencatan-senjata/7997304.html>.

World Bank Economic Monitoring Report. 2025a. *IMPACTS OF THE CONFLICT IN THE MIDDLE EAST ON THE PALESTINIAN ECONOMY*. Text/HTML. <https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza>.

World Bank Economic Monitoring Report. 2025b. *IMPACTS OF THE CONFLICT IN THE MIDDLE EAST ON THE PALESTINIAN ECONOMY*. Text/HTML. <https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza>.

World Health Organization. n.d. *Gaza Hostilities 2023 - 2025 - Emergency Situation Reports*. Accessed August 5, 2025. <http://www.emro.who.int/opt/information-resources/emergency-situation-reports.html>.